DOKUMEN RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA

TAHUN 2026



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2024

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

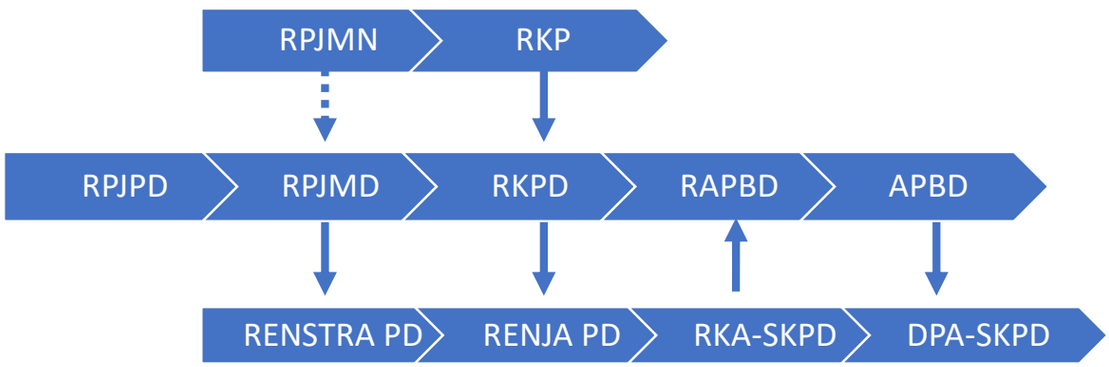
Tahapan penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dan pada akhirnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

1.3.2.Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2026 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun ke-3 (ketiga) periode tahun 2026; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk melalui capain kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2026 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024, serta pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026

(Target Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 7	11 = (10/4)
2					**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**									
2	**14**				**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**86,00 Nilai**	**-**	**82,00 Nilai**	**80,50 Nilai**	**98,17 Nilai**	**84,00 Nilai**	**80,50 Nilai**	**93,60%**
2	**14**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**33 Dokumen**	**45 Dokumen**	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	**100%**	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	**33,33%**
2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	33,33%
2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	10 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	33,33%
2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	33,33%
2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**66 Dokumen**	**50 Dokumen**	**32 Dokumen**	**27 Dokumen**	**84,38%**	**33 Dokumen**	**27 Dokumen**	**40,91%**
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/ Bulan	31 Orang	31 Orang/ Bulan	31 Orang/ Bulan	100%	31 Orang/ Bulan	31 Orang/ Bulan	33,33%
2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	33,33%
2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 Laporan	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	33,33%
2	**14**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**9 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100%**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**33,33%**
2	14	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	93 Orang	99 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	24 Orang	2 Orang	2,15%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 7	11 = (10/4)
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**99 Dokumen**	**159 Dokumen**	**33 Dokumen**	**33 Dokumen**	**100%**	**77 Dokumen**	**33 Dokumen**	**33,33%**
2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	33,33%
2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	33,33%
2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	33,33%
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	33,33%
2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	33,33%
2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	33 Laporan	55 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100%	11 Laporan	11 Laporan	33,33%
2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	33,33%
2	14	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	33,33%
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**108 Laporan**	**180 Laporan**	**36 Laporan**	**36 Laporan**	**100%**	**36 Laporan**	**36 Laporan**	**33,33%**
2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	33,33%
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	33,33%
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	33,33%
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**129 Unit**	**81 Unit**	**81 Unit**	**81 Unit**	**100%**	**92 Unit**	**81 Unit**	**62,79%**
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 Unit	81 Unit	81 Unit	81 Unit	100%	82 Unit	81 Unit	100%
2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	75 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	22,22%
2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	33,33%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 7	11 = (10/4)
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi**	**98,75%**	- -	**84,29%**	**100%**	**118,64%**	**92,00%**	**100%**	**101,27%**
						Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal	**9 Sekolah Siaga Kependudukan**	- -	**3 Sekolah Siaga Kependudukan**	**3 Sekolah Siaga Kependudukan**	**100%**	**3 Sekolah Siaga Kependudukan**	**3 Sekolah Siaga Kependudukan**	**33,33%**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**36 Kegiatan**	**4 Kegiatan**	**9 Kegiatan**	**9 Kegiatan**	**100%**	**24 Kegiatan**	**9 Kegiatan**	**25,00%**
2	14	02	2.01	0009	Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	12 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	100%	4 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	25,00%
2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	12 Laporan	3 Laporan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	3 Kegiatan	25,00%
2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	15 Kegiatan	3 Kegiatan	25,00%
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun**	**75 Laporan**	**51 Laporan**	**36 Laporan**	**36 Laporan**	**100,00%**	**24 Laporan**	**36 Laporan**	**48,00%**
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	33,33%
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	- -	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	12 Laporan	-
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	36 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	33,33%
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Prosentase Peserta KB Aktif**	**80,07%**	**77,12%**	**80,05%**	**78,24%**	**97,74%**	**80,06%**	**78,24%**	**97,71%**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**21 Kegiatan**	**30 Kegiatan**	**6 Kegiatan**	**6 Kegiatan**	**100%**	**6 Kegiatan**	**6 Kegiatan**	**28,57%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 7	11 = (10/4)
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3 Laporan	22 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	12 Laporan	400%
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	- -	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	12 Laporan	-
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	- -	80 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	12 Laporan	-
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	18 Dokumen	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	33,33%
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	- -	25 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	100%	-	5 Organisasi	-
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang didayagunakan**	**5160 Kader**	**5160 Kader**	**5160 Kader**	**5160 Kader**	**100%**	**5160 Kader**	**5160 Kader**	**100%**
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5160 Kader	5160 Kader	5160 Kader	5160 Kader	100%	5160 Kader	5160 Kader	100%
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Akseptor yang Terlayani**	**435.000 Orang**	**724.123 Orang**	**140.000 Orang**	**138.630 Orang**	**99,02%**	**145.000 Orang**	**138.630 Orang**	**31,87%**
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	33,33%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 7	11 = (10/4)
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	435.000 Orang	724.123 Orang	140.000 Orang	138.630 Orang	99,02%	145.000 Orang	138.630 Orang	31,87%
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	6 Laporan	10 Laporan	2 Laporan	- Laporan	0%	2 Laporan	- Laporan	-
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	- -	76 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	-
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**	**49 Kampung KB**	**49 Kampung KB**	**49 Kampung KB**	**49 Kampung KB**	**100%**	**49 Kampung KB**	**49 Kampung KB**	**100%**
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	- -	- -	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	-
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	49 Kampung KB	49 Kampung KB	49 Kampung KB	49 Kampung KB	100%	49 Kampung KB	49 Kampung KB	100%
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1. Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R)**	**89,03%**	**-**	**89,01%**	**57,29%**	**64,36%**	**89,02%**	**57,29%**	**64,35%**
						2. Persentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun	**10,00%**	**7,77%**	**10,20%**	**7,59%**	**134,39%**	**10,10%**	**7,59%**	**131,75%**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kelompok Kegiatan yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**5 Kelompok Kegiatan**	**5 Kelompok Kegiatan**	**5 Kelompok Kegiatan**	**5 Kelompok Kegiatan**	**100%**	**5 Kelompok Kegiatan**	**5 Kelompok Kegiatan**	**100%**
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	18 Laporan	10 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	3 Laporan	4 Laporan	22,22%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 7	11 = (10/4)
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	- -	- -	3 Laporan/Dokumen	3 Laporan/Dokumen	100%	-	3 Laporan/Dokumen	-
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	18 Laporan	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	27,78%
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	- -	49 Unit	25 Unit	25 Unit	1	-	25 Unit	-
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	180 Orang	100 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	27,78%
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**-**	**-**	**5 Organisasi**	**5 Organisasi**	**100%**	-	**5 Organisasi**	-
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita)	- -	- -	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	12 Laporan	-
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan	- -	- -	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	12 Laporan	-

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk s/d Tahun 2024 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**98,17 %**	**Sangat Tinggi**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal.	Target bisa terpenuhi.	Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal yang sudah ditentukan.
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**97,74 %**	**Sangat Tinggi**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal.	Target bisa terpenuhi.	Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal yang sudah ditentukan.

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Pengendalian Penduduk	**109,32%**	**Sangat Tinggi**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal.	Target bisa terpenuhi.	Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal yang sudah ditentukan.
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**99,37 %**	**Sangat Tinggi**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Anggota Kelompok Kegiatan belum tentu berstatus Pasangan Usia Subur (PUS)	Kurang tercapainya Target Kinerja	Berkoordinasi dengan Penyuluh KB pada Wilayah Sasaran
Anggota Kelompok Kegiatan yang berstatus Pasangan Usia Subur (PUS) tetapi ingin mempunyai anak segera.	Kurang tercapainya Target Kinerja	Berkoordinasi dengan Penyuluh KB pada Wilayah Sasaran

Sumber: Laporan Evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk s.d Bulan November Tahun 2024

Kemudian dalam rangka pencapaian kinerja perangkat daerah perlu didukung data yang relevan sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

  Dalam Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja, realisasi, target dan capaian kinerja sebagai berikut :

  - Prosentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada Tahun 2024 ditargetkan dengan Nilai 82,00, dan telah terealisasi dengan **Nilai 80,50 Kategori "A",** maka diperoleh persentase capaian sebesar 98,17%. Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 7 dokumen antara lain :
    1. Dokumen Renja/Perubahan Renja
    2. Dokumen RKA/Perubahan RKA
    3. Dokumen DPA/Perubahan DPA
    4. Dokumen LKjIP
    5. Dokumen LPPD
    6. Dokumen LKPJ
    7. Dokumen SAKIP
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan keluaran Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah antara lain Dokumen, administrasi Gaji dan Tunjangan ASN, Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PPKB.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan keluaran Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu 2 Dokumen Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan biaya jasa instruktur senam bagi pegawai PPKB.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan keluaran Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 33 Dokumen antara lain Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 36 Laporan terkait Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta Pelayanan Umum Kantor.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan keluaran Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara sebanyak 81 unit Kendaraan Dinas Operasional, 10 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya serta 1 unit Gedung Kantor.

- **Program Pengendalian Penduduk**

Dalam Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dengan indikator kinerja, realisasi, target dan capaian kinerja sebagai berikut :

- Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi dengan target sebesar 84,29% pada Tahun 2024 telah terealisasi 100%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 118,64%.
- Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal dengan target 3 Sekolah Siaga Kependudukan pada Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 100%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 100%.

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dengan keluaran Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk sebanyak 3 Kegiatan antara lain :
   - Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal
   - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
   - Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun yaitu sebanyak 12 Laporan, yang terdiri dari Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga dan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

- **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator kinerja, realisasi, target dan capaian kinerja sebagai berikut :

- Persentase Peserta KB Aktif, yaitu Jumlah Peserta KB Aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Sampai dengan Bulan November, Jumlah Peserta KB Aktif adalah 138.630, sedangkan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) adalah 177.190, maka s.d Bulan November telah terealisasi sebesar 78,24% dan target pada Tahun 2024 adalah 80,05%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 97,74%.

  Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

  1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan keluaran Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal sebanyak 6 Kegiatan.
  2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan keluaran Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang didayagunakan yaitu sebanyak 5160 Kader.
  3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan keluaran Terwujudnya Pengendalian dan Pemakaian Alat dan Obat Kontrasepsi sebanyak 12 Laporan.
  4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan keluaran Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB sebanyak 49 Kampung KB

- **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Dalam Pelaksanaan Program Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator kinerja, realisasi, target dan capaian kinerja sebagai berikut :

- Keluarga yang Ber-KB yang Mengikuti kelompok Kegiatan adalah Keluarga yang ber-KB yang mampu menjalankan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) melalui Kelompok Kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).

  Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R) s.d Bulan November telah terealisasi sebesar 58,14%, sedangkan Target pada Tahun 2024 adalah 89,01%, sehingga tercapai sebesar 65,32%.
- Persentase usia Nikah Pertama dibawah usia 21 tahun, s.d Bulan November telah terealisasi sebesar 4,63%, sedangkan Target pada Tahun 2024 adalah 10,20%, sehingga tercapai sebesar 220,30%%

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan keluaran Jumlah Kelompok Kegiatan yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebanyak 5 Kelompok Kegiatan, yaitu : (1) Bina Keluarga Balita (BKB); (2) Bina Keluarga Remaja (BKR); (3) Bina Keluarga Lansia (BKL); (4) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R); dan (5) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	TARGET SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi Realisasi	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024 (s.d November)	Tahun 2025	
1	Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total	-	2,00 Anak	2,00 Anak	2,00 Anak	2,00 Anak	-	2,00 Anak	TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Sehingga realisasinya tidak bisa dibagi per Tribulan/per Semester. *Data pada Tahun 2024 Belum ada
2	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	-	80,06%	80,05%	80,06%	80,07%	78,24%	80,06%	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi adalah Jumlah Peserta KB Aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Pengukuran tersebut sebagai bentuk upaya untuk mendukung capaian peserta KB aktif. Sampai dengan Bulan November, Jumlah Peserta KB Aktif adalah 138.630, sedangkan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) adalah 177.190, maka s.d Bulan November telah terealisasi sebesar 78,24%. Target pada Tahun 2024 adalah 80,05%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 97,74%. Realisasi Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi belum bisa tercapai sesuai dengan target karena : - Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang Hamil. - Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin mempunyai anak segera.

No	Indikator	TARGET SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi Realisasi	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024 (s.d November)	Tahun 2025	
3	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	-	11,30%	11,40%	11,30%	11,20%	10,13%	11,30%	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) adalah pasangan dengan usia produktif yang seharusnya KB namun belum KB. Pasangan Unmet Need adalah pasangan yang tidak menginginkan anak lagi dan pasangan yang menginginkan untuk menunda mempunyai anak. Sampai dengan Bulan November, Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang seharusnya KB tapi belum KB adalah 17.948, Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) adalah 177.190, maka s.d Bulan November telah terealisasi sebesar 10,13%. Target pada Tahun 2024 adalah 11,40%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 112,54%. Realisasi Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) belum bisa tercapai sesuai dengan target karena : - Karena alasan kesehatan, misalnya Gangguan Hormonal, Alergi dsb. - Usia masih dalam range Pasangan Usia Subur (PUS), tetapi yang bersangkutan merasa sudah manopouse.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam peningkatan kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Penyuluh Keluarga Berencana yang ada.
2. Menyajikan Data Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) yang akurat dan terpublikasi.
3. Melakukan motivasi kepada para Penyuluh KB serta Kader KB guna menggerakan masyarakat, agar aktif dalam pelaksanaan dan keberhasilan program KB.
4. Mengoptimalkan keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) disetiap kecamatan bersama lintas sektoral.
5. Meningkatkan Kepesertaan KB MKJP.
6. Memberikan Uang pengganti tidak bekerja kepada akseptor KB MOP dan MOW.
7. Fasilitasi ayoman pada akseptor KB yang mengalami kegagalan pasca Pelayanan KB
8. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, kualitas dan kuantitas pelayanan KB berupa pelayanan konseling, KB Medis operasi dan pemasangan alat kontrasepsi.
9. Pemberian sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada Remaja dan perencanaan berkeluarga cegah stunting.
10. Pembinaan dan pelatihan bagi akseptor KB guna meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga melalui Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA).
11. Pendampingan kepada Keluarga Resiko Stunting.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yaitu :

"Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK)"

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
b. Perumusan kebijakan teknis pada Program Pengendalian Penduduk;
c. Perumusan kebijakan teknis daerah pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
d. Perumusan kebijakan teknis daerah pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi Akseptor;
e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi Akseptor;
f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang KKBPK;
g. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan penggerakan, pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang KKBPK; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan Hambatan dalam melaksanankan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Masih terdapat Keluarga Beresiko Stunting yang perlu mendapat pendampingan.
2. Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) masih belum optimal.
3. Adanya mitos/kultur yang negatif terhadap jenis KB MOP .
4. Adanya keterbatasan daya dukung (Kapasitas SDM dan Kestabilan sistem Informasi Pusat) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).
5. Muatan dan Pesan dalam Penyampaian Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) masih perlu untuk terus dikembangkan.
6. Kurang Optimalnya Integrasi dengan Lintas Sektor terkait Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (KB).
7. Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan Ingin Anak Tunda (IAT) tidak ber-KB perlu pembinaan menjadi Peserta KB.

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Program Prioritas Daerah serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s)

Pelaksanaan jangka menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan ke (2) “Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing” sesuai dengan Tujuan “Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk“ serta Sasaran strategis daerah “Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas”.

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.

10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi sebagai OPD pendukung pencapaian 17 Tujuan TPB.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dibandingkan dengan luas wilayah kerja.
2. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nganjuk.

3. Tingkat partisipasi KB pria masih rendah, karena Adanya mitos/kultur yang negatif terhadap jenis KB MOP.
4. Muatan dan Pesan dalam Penyampaian Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) masih perlu untuk terus dikembangkan.
5. Pasangan Usia Subur (PUS) tidak ber-KB yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan Ingin Anak Tunda (IAT) perlu pembinaan menjadi Peserta KB.
6. Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) belum optimal.
7. Perlunya penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB termasuk penguatan data dan informasi kependudukan dan KB bersama stakeholder/seluruh elemen masyarakat.
8. Data kependudukan (data migrasi masuk, data migrasi keluar, jumlah kelahiran, jumlah kematian) masih sangat tergantung pada ketersediaan data lintas sektor.
9. Masih terdapat Keluarga Risiko Stunting yang perlu mendapat pendampingan.
10. Adanya keterbatasan daya dukung (Kapasitas SDM dan Kestabilan sistem Informasi Pusat) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).
11. Kurang Optimalnya Integrasi dengan Lintas Sektor terkait Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (KB).
12. Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) masih belum optimal.

Sedangkan peluang yang didapatkan dalam peningkatan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas teknis dan peran stakeholder dalam rangka advokasi dan sosialisasi program keluarga berencana dan ketahanan keluarga.

2. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Program Nasional.
3. Komitmen Pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga akseptor.

2.3.5. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Beberapa isu-isu penting dan strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi dan integrasi Sistem Satu Data untuk data Stunting dengan Lintas Sektor.
2. Optimalisasi pelaksanaan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) untuk meminimalisir terjadinya Stunting baru pada Balita.
3. Peningkatan sinergitas dan dukungan Percepatan Penurunan Stunting dengan pihak ketiga.
4. Pemahaman keluarga terhadap Stunting masih kurang.
5. Keikutsertaan keluarga terhadap kelompok kegiatan masih rendah.
6. Kurangnya pemahaman keluarga terkait 8 Fungsi Keluarga, antara lain : 1) Fungsi Agama; 2) Fungsi Sosial Budaya; 3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; 4) Fungsi Perlindungan; 5) Fungsi Reproduksi; 6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; 7) Fungsi Ekonomi; dan 8) Fungsi Lingkungan.
7. Peningkatan peran Organisasi Kemasyarakatan, Sekolah dan Lembaga terkait lainnya untuk mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).
8. Penguatan, Sosialisasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
9. Optimalisasi Kerjasama dengan BKKBN untuk mendukung Penguatan SDM, Sistem Informasi dan Program

Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).

10. Memaksimalkan peningkatan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).
11. Peningkatan peran Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintah Desa serta keterlibatan sektor swasta untuk mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).
12. Penguatan, Sosialisasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah **"Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas".**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2026 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2026 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**20.687.585.100**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**16.961.288.130**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**86,00 Nilai**	**8.511.870.100**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**86,00 Nilai**	**5.746.373.730**	
A	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**10 Dokumen**	**48.766.300**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**10 Dokumen**	**44.333.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.317.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.470.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	11.352.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.320.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	17.097.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.543.000	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21 Dokumen**	**4.876.513.800**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21 Dokumen**	**2.285.446.000**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/ Bulan (25 ASN x 12 Bulan)	4.856.013.800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/ Bulan (25 ASN x 12 Bulan)	2.266.816.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	12.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	11.178.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Laporan	8.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Laporan	7.452.000	
C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**49 Dokumen**	**250.840.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**49 Dokumen**	**255.000.000**	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	15.840.000	-	-	-	-	-	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang	235.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang	255.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**77 Dokumen**	**783.750.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**77 Dokumen**	**795.871.930**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.905.760	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	375.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	380.000.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	80.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	88.996.170	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	11.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	6.000.000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	8.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	7.000.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	287.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	290.000.000	
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	8.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	7.970.000	
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36 Laporan**	**1.082.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36 Laporan**	**1.198.157.500**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.157.500	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	98.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	95.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	980.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.100.000.000	
F	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terpelihara**	**115 Unit**	**1.470.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terpelihara**	**115 Unit**	**1.167.565.300**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92 Unit	245.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92 Unit	242.565.300	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	55.000.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit	1.165.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit	870.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**- Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi - Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal**	**98,75% 7 Sekolah Siaga Kependudukan**	**850.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**- Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi - Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal**	**98,75% 7 Sekolah Siaga Kependudukan**	**725.000.000**	
A	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**29 Kegiatan**	**275.000.000**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**29 Kegiatan**	**225.000.000**	
1	Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	7 Satuan Pendidikan	75.000.000	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	7 Kegiatan	50.000.000	
3	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	7 Kegiatan	50.000.000	-	-	-	-	-	
4	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	15 Kegiatan	150.000.000	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan	7 Satuan Pendidikan	75.000.000	
6	-	-	-	-	-	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan	15 Dokumen	100.000.000	
B	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun**	**24 Laporan**	**575.000.000**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun**	**24 Laporan**	**500.000.000**	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	155.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	150.000.000	
2	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	420.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	350.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Prosentase Peserta KB Aktif**	**80,07%**	**10.375.215.000**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Prosentase Peserta KB Aktif**	**80,07%**	**9.579.914.400**	
A	**Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**12 Kegiatan**	**1.150.000.000**	**Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**12 Kegiatan**	**951.755.000**	
1	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	1.150.000.000	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	951.755.000	
B	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang didayagunakan**	**5160 Orang**	**8.150.000.000**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang didayagunakan**	**5160 Orang**	**7.536.444.400**	
1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5160 Orang	8.150.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5160 Orang	7.536.444.400	
C	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Akseptor yang Terlayani**	**150.000 Orang**	**910.215.000**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Akseptor yang Terlayani**	**150.000 Orang**	**916.715.000**	
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	11.715.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	11.715.000	
2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	150.000 Orang	886.000.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	150.000 Orang	900.000.000	
3	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2 Laporan	12.500.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2 Laporan	5.000.000	
D	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**	**284 Kampung KB**	**165.000.000**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**	**284 Kampung KB**	**175.000.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	284 Kampung KB	165.000.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	284 Kampung KB	175.000.000	
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**- Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R)** **- Persentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun**	**89,03%** **10,00%**	**950.500.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**- Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R)** **- Persentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun**	**89,03%** **10,00%**	**910.000.000**	
A	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Kelompok Kegiatan yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**5 Kelompok Kegiatan**	**950.500.000**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Dinas PPKB Kab. Nganjuk**	**Jumlah Kelompok Kegiatan yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**5 Kelompok Kegiatan**	**910.000.000**	
1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	12 Laporan	375.000.000	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	33.339 Keluarga	350.000.000	
3	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	12 Laporan	350.500.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	12 Laporan	360.000.000	
4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	50 Orang	225.000.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas PPKB Kab. Nganjuk	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	50 Orang	200.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2026

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2026 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah “Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk”, adapun sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas”, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,33 %
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2026**
Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas	Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,00 Anak
	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,07 %
	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,20 %

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk tahun 2026 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1. Pencapaian Tujuan dan Sasaaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2026, yaitu **"Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi, dengan prioritas pembangunan tahun 2026 sebagai berikut :

1. Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat
3. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, tata kelola sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman
5. Meningkatkan kualitas pendidikan.
6. Meningkatkan stabilisasi keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kerukunan, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

3.3.2. Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan target 100% (seratus persen) untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Pendidikan anak usia dini	100%
2.	Pendidikan dasar	100%
3.	Pendidikan kesetaraan	100%
4.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
5.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
6.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
7.	Pelayanan kesehatan balita	100%
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%

NIHIL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
12.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	100%
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%
19.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
20.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%
21.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%
22.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
23.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
24.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%
26.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%
29.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

3.3.3. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2026 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2026)
1.	Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	16.961.288.130

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi salah satu fokus utama yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Untuk menunjang program penanggulangan kemiskinan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui kegiatan Pelayanan KB dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2026)	Alokasi (2026)
1.	Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas	Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,00	725.000.000
		Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,07	9.579.914.400

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2026)	Alokasi (2026)
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,20	910.000.000

Berikut penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

1. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR).
   TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. TFR adalah sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.
2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi atau Prosentase capaian peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pengukuran tersebut sebagai bentuk upaya untuk mendukung capaian peserta KB aktif. Pengukuran tersebut juga menunjukkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam program KB. Dengan harapan dapat melakukan kontrol capaian target terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Nganjuk
3. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)
   Unmet Need adalah pasangan dengan usia produktif yang seharusnya KB namun belum KB. Pasangan Unmet Need adalah pasangan yang tidak menginginkan anak lagi dan pasangan yang menginginkan untuk menunda mempunyai anak.

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF
		URAIAN (OUTPUT)	TARGET	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**16.961.288.130**
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**86,00 Nilai**	**5.746.373.730**
2.14.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**10 Dokumen**	**44.333.000**
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.470.000
2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.320.000
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.543.000
2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21 Dokumen**	**2.285.446.000**
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/ Bulan (25 ASN x 12 Bulan)	2.266.816.000
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	11.178.000
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Laporan	7.452.000
2.14.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**49 Dokumen**	**255.000.000**
2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang	255.000.000
2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**77 Dokumen**	**795.871.930**
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.905.760
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	380.000.000
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	88.996.170
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000
2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	6.000.000
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	7.000.000
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	290.000.000
2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	7.970.000
2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36 Laporan**	**1.198.157.500**
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.157.500
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	95.000.000
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.100.000.000
2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terpelihara**	**115 Unit**	**1.167.565.300**
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92 Unit	242.565.300
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	55.000.000
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit	870.000.000

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF
		URAIAN (OUTPUT)	TARGET	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**- Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi** **- Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal**	**98,75%** **7 Sekolah Siaga Kependuduka**	**725.000.000**
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**29 Kegiatan**	**225.000.000**
2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	7 Kegiatan	50.000.000
2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur	7 Satuan Pendidikan	75.000.000
2.14.02.2.01.0031	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	15 Dokumen	100.000.000
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun**	**24 Laporan**	**500.000.000**
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	150.000.000
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	350.000.000
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Prosentase Peserta KB Aktif**	**0,8007**	**9.579.914.400**
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**12 Kegiatan**	**951.755.000**
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	951.755.000
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang didayagunakan**	**5160 Orang**	**7.536.444.400**
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5160 Orang	7.536.444.400
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Akseptor yang Terlayani**	**150.000 Orang**	**916.715.000**
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	11.715.000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	150.000 Orang	900.000.000
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2 Laporan	5.000.000
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**	**284 Kampung KB**	**175.000.000**
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	284 Kampung KB	175.000.000
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**- Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R)** **- Persentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun**	**89,03%** **10,00%**	**910.000.000**

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF
		URAIAN (OUTPUT)	TARGET	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kelompok Kegiatan yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**5 Kelompok Kegiatan**	**910.000.000**
2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	33.339 Keluarga	350.000.000
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	12 Laporan	360.000.000
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	50 Orang	200.000.000

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi salah satu fokus utama yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Untuk menunjang program penanggulangan kemiskinan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tersebut diatas

Tabel 4.4
Proyek Strategis Daerah yang Dilaksanakan Perangkat Daerah

No.	Proyek Strategis	Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Uraian (Output)	Target	
1.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB • Pelaporan Data Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) melalui Sistem pelaporan berbasis Online dan Offline (untuk Data Base target dan capaian Program BANGGA KENCANA)	**Tujuan :** Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing **Sasaran :** Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	350.000.000
2.	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang • Penyebarluasan Informasi dan Edukasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) melalui Media KIE (Media Cetak, Media Elektronik, Media Luar Ruang) • Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Keluarga Risiko Stunting (KRS)		• Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program BANGGA KENCANA Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang • Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Keluarga Risiko Stunting (KRS)	12 Dokumen 33.339 KRS	951.755.000

No.	Proyek Strategis	Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Uraian (Output)	Target	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) • Pembinaan terhadap Kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana agar tercapainya Program BANGGA KENCANA dengan memberikan Pembekalan Fungsi dan Peran Kader IMP dalam pengembangan dan keberhasilan Program BANGGA KENCANA. • Kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana bisa mengadvokasi dan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam Program BANGGA KENCANA		• Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5160 Kader	7.536.444.400
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) • Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP dan Non MKJP) **Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas** • Lomba Kampung Keluarga Berkualitas • Pertemuan POKJA Kampung Keluarga Berkualitas • Monev Supervisi dan Pembinaan pada Kampung Keluarga Berkualitas • Rapat Koordinasi dengan Lintas Sektor		• Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) • Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana	150.000 Orang 284 Kampung KB	900.000.000

No.	Proyek Strategis	Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Uraian (Output)	Target	
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) • Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) • Sekolah Lansia Tangguh (SELANTANG)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	12 Laporan	350.000.000
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) • Pemilihan Duta GenRe • Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKA)	1 Laporan	360.000.000

No.	Proyek Strategis	Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Uraian (Output)	Target	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) • Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) • Pelatihan bagi Kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) • Pameran Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	50 Orang	200.000.000

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi salah satu fokus utama yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Untuk menunjang program penanggulangan kemiskinan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui proyek strategis sebagaimana tersebut diatas

Tabel 4.5
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	

NIHIL

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk, untuk

memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2026; dan
3. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Nganjuk, November 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK

NAFHAN TOHAWI, S.H. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005